

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, berbagai perubahan corak politik sudah mulai mewarnai Regional Amerika Latin. Dimulai pada dekade 1970-an ketika dominasi rezim-rezim militer hingga pada dekade 1980-an dan 1990-an menuju peralihan kepada corak liberalisme dan demokrasi, dan pada awal abad ke-21 ini, terjadi pergeseran ke arah sosialisme yang cukup signifikan. Pergeseran ke arah sosialisme di Amerika Latin sendiri bukanlah suatu hal yang baru dan hal tersebut merupakan dampak secara langsung bahwa kegagalan negara-negara di Kawasan Amerika Latin ketika bercorak neoliberalisme secara faktual telah mengakibatkan wilayah tersebut sebagai salah satu kawasan yang negara-negara di dalamnya terjebak pada tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia (Subono, 2008).

Memasuki abad ke-21, muncul tokoh-tokoh politik beraliran sosialisme dan menjadi pemimpin negara-negara di Amerika Latin, seperti Evo Morales di Bolivia (2006), Hugo Chavez di Venezuela (1998), Michelle Bachelet di Chile (2006), Luis Inacio Lula da Silva di Brazil (2003), dan yang lainnya. Terpilihnya beberapa politisi beraliran “kiri” di berbagai negara di kawasan Amerika Latin ini mayoritas memenangkan suara dalam mekanisme politik elektoral, dengan perolehan suara rata-rata di atas 40 persen. Hal tersebut merupakan bukti nyata kebangkitan gerakan sosialisme dan anti-liberalisme semakin mengakar di negara-negara Amerika Latin (Sari, 2014). Beberapa negara di Amerika Latin pernah terjerumus ke dalam lingkungan dependensi yang mengakar terhadap kapitalisme global. Oleh sebab itu, munculnya para tokoh-tokoh politik beraliran kiri tersebut berupaya menghidupkan kembali neo-sosialisme di kawasan

Amerika Latin dan membendung arus dan agenda neo-liberal yang telah mengakar di Amerika Latin (Wirasenjaya, 2018).

Pada tanggal 22 Januari 2006, Bolivia menjadi negara yang turut meramaikan pergeseran warna corak politik di Kawasan Amerika Latin ke arah sosialisme. Pada hari tersebut merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi rakyat Bolivia, yaitu naiknya Evo Morales yang merupakan tokoh masyarakat pribumi pertama di Amerika Latin yang berhasil terpilih menjadi pemimpin tertinggi di negara tersebut. Morales yang merupakan anak petani miskin dari suku Indian Aymara dan merupakan salah satu tokoh yang menjadi penggerak dari berbagai aksi perjuangan rakyat pribumi Bolivia telah hadir memberikan semangat optimisme yang meluap dari masyarakat adat di Bolivia yang diketahui setelah sekian lama terkekang di dalam dominasi elit *white-mestizo* (Stewart, 2020).

Dominasi elit *white-mestizo* yang telah dimulai dari penaklukan dan kolonialisme spanyol pada awal tahun 1500-an. Dengan ditandainya kekuasaan Spanyol di Amerika Latin, para *conquistador*, pemukim dan misionaris Kristen berdatangan ke koloni Spanyol itu. Kerajaan Spanyol memberikan hak berupa *encomiendas*, yakni hak untuk meminta pajak atau tenaga kerja dari bangsa pribumi indian yang ada disana. Pada mulanya *encomiendas* dimaksudkan untuk melindungi tanah-tanah bangsa indian, tetapi berbalik menjadi perkembangan sistem perbudakan dan kerja paksa yang mengikat bangsa Indian di tanah leluhurnya sendiri. Hal tersebutlah yang selama 3 abad lamanya dirasakan oleh masyarakat asli pribumi di Bolivia (Nugroho, 2016).

Evo Morales berpartisipasi pada pemilihan umum 2005 di Bolivia dengan mengendarai partai politiknya yaitu partai MAS (*Movimiento al Socialismo*) yang merupakan partai etnik yang beranggotakan koalisi dari berbagai

elemen gerakan akar rumput di Bolivia, mulai dari gerakan petani, gerakan buruh, gerakan masyarakat adat pribumi dan berbagai organisasi di tingkat akar rumput dan gerakan-gerakan yang menolak praktik-praktik privatisasi. Pada pemilihan umum tersebut Morales yang merupakan calon dari Partai MAS mampu meraup suara sebanyak 53,7 persen mengalahkan lawan politiknya Jorge Quiroga dari Partai PODEMOS yang hanya mampu meraih jumlah suara sebanyak 28,6 persen pada pemilihan umum tersebut (Hirseland & Strijbis, 2019).

Farthing & Kolh (2014) mendeskripsikan dalam bukunya yang berjudul *Evo's Bolivia: Continuity and Change* bahwasanya pada awal tahun 2006 ketika Morales mulai memasuki istana kepresidenan, puluhan ribu masyarakat Bolivia berdansa dan bernyanyi di jalan-jalan protokol di kota La Paz untuk merayakan telah hadirnya sosok pemimpin baru mereka yang berasal dari etnik pribumi dan masyarakat akar rumput. Morales seketika diberi julukan *apu mallku* yang bermakna pemimpin penuh. Seluruh rakyat Bolivia telah meletakkan harapan penuh kepada Evo Morales untuk dapat segera mengangkat derajat kaum miskin kota dan marjinal di Bolivia (Farthing & Kohl, 2014).

Kepemimpinan Evo Morales pada periode pertama kepemimpinannya (2006-2009) secara cepat menanggapi persoalan politik yang menjadi isu utama dalam masyarakat Bolivia pada saat itu. Respon langsung tersebut berupa rancangan draf konstitusi baru yang akan diterbitkan oleh Morales dengan memperluas akomodasi bagi kepentingan masyarakat adat pribumi dan hak-hak formal bagi kaum perempuan yang telah dirancang pada tahun 2006 dan disahkan pada tahun 2009 (Kenneth, 2011).

Kebijakan tersebut telah berhasil membawa perubahan sosial yang sangat signifikan ke dalam masyarakat Bolivia. Di bawah kepemimpinan Morales, hak-hak bagi kaum

perempuan kian jauh meningkat ditandai dengan legislator perempuan nasional Bolivia tertinggi kedua di dunia (setelah Rwanda), hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang sangat sangat massif, di mana di Bolivia sendiri, kaum perempuan berhasil memenangkan suara terakhir dalam ajang perpolitikan hanya pada tahun 1953 (Farthing, 2015).

Kebijakan Morales pada awal kepemimpinannya telah membuka dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat adat secara terbuka untuk dapat masuk turut serta berperan di dalam pemerintahannya. Contoh yang paling menonjol dari kebijakan tersebut adalah terbentuknya konstitusi baru pada tahun 2009, Morales membentuk Majelis Konstituente bagi masyarakat adat pribumi untuk menciptakan kembali konstitusi negara yang melahirkan Negara Plurinasional Bolivia dengan tujuan untuk mengakhiri diskriminasi yang telah dirasakan oleh masyarakat adat pribumi Bolivia selama berabad-abad lamanya (Postero, 2017).

Dalam segi perekonomian, Morales dengan berani melakukan program politik yang sangat dibenci oleh negara-negara blok Barat, yaitu melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang gas alam dan timah. Diketahui bahwa Bolivia memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di Amerika Latin dan memiliki 5,4 juta ton kubik lithium, yang merupakan 70 persen cadangan dunia. Dalam segi kebijakan keuangan, Morales telah melakukan desentralisasi fiskal dan ekonomi, memotong lebih dari 50 persen gajinya untuk memperbanyak tenaga pendidik hingga melegalkan perkebunan koka (Linda C. Farthing, 2014).

Hal-hal tersebut merupakan ambisi yang dimiliki oleh Morales dalam upaya memperbaiki sektor perekonomian dalam negeri yang selama ini telah dikuasai oleh korporasi-korporasi asing yang telah menyebabkan kemiskinan dan

ketimpangan di tengah kehidupan sosial masyarakat Bolivia. Dengan terjadinya kemajuan dan proses yang signifikan oleh Morales di awal periode kepemimpinannya, telah menyebabkan partai MAS menjadi partai yang sangat berkuasa di Bolivia, partai MAS tidak hanya mendominasi pemilihan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional melainkan juga mendominasi di tingkat provinsi dan kota. Pada pemilu 2009, Morales kembali memenangkan pemilihan presiden di tahun tersebut. Morales berhasil meraup jumlah suara sebesar 64,2 persen mengungguli lawan politiknya Mafred Villa dari Partai PPB-CN yang hanya meraup jumlah suara sebesar 26,5 persen suara (Hirseland & Strjibis, 2019).

Jika mengacu kepada pasal 168 dalam konstitusi baru Negara Plurinasional Bolivia tahun 2009, disebutkan bahwa masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode berturut-turut. Mengacu ke dalam aturan tersebut, maka masa kepemimpinan periode kedua Morales tahun 2009-2014 merupakan masa jabatan yang terakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali Namun, Evo Morales mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan membawa argumen bahwa konstitusi baru tersebut telah merubah bentuk negara Bolivia dan hal tersebut tidak berlaku surut (Constitute Project, 2009).

Permohonan Morales tersebut dimaksudkan bahwa periode kepemimpinnya pada tahun 2009-2014 merupakan periode awal kepemimpinan Morales dalam menjabat sebagai Presiden Bolivia dengan bentuk negara dan konstitusi yang baru. Permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim sehingga Morales dapat maju kembali sebagai kandidat presiden Bolivia di Pemilu berikutnya.

Pada tahun 2014, Evo Morales kembali memenangkan kontestasi pemilihan presiden dan berhak memimpin Bolivia hingga tahun 2019. Morales memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 61,4 persen suara mengungguli

lawannya yaitu kandidat yang berasal dari partai *Democrat Unity* dengan calon Samuel Doria Media yang hanya mampu meraih suara sebanyak 24,2 persen (Hirseland & Stribis, 2019).

Pada periode kepemimpinan Morales yang ketiga, Morales berhasil menunjukkan angka-angka keberhasilan sebagai seorang kepala negara dengan penduduk yang berpopulasi lebih dari 11 juta orang. Berdasarkan data yang dilansir dari PBB, pada tahun 2005 GDP Bolivia yang hanya sebesar USD 9 Milyar meningkat tajam menjadi USD 37 Milyar pada tahun 2019. Dalam sektor pariwisata juga telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan ditandai dengan kedatangan wisatawan dari 524 ribu jiwa pada tahun 2005 meningkat menjadi 1,3 juta jiwa pada tahun 2019 (UN, 2020).

Pemerintahan di bawah Morales konsisten meningkatkan belanja sosial hingga 750 persen dalam 9 tahun terakhir, peningkatan tersebut diperoleh dari keberhasilan pemerintahan Morales dalam meningkatkan pemasukan negara dari pengelolaan sumber daya alam dan berhasil mengurangi angka kemiskinan yang berawal dari 60,5 persen ditahun 2005 menjadi 45 persen ditahun 2011, sedangkan kemiskinan ekstrim berkurang dari 36,7 persen yang terjadi ditahun 2005 menjadi 20,1 persen di tahun 2011.

Pemerintahan Morales juga konsisten meningkatkan upah minimum bagi klas-klas pekerja di Bolivia, ditandai dengan meningkatnya upah minimum di Bolivia sebesar 104 persen dan hal tersebut termasuk kedalam peningkatan upah minimum pekerja tertinggi di Amerika Latin. Pada tahun 2014, Bolivia telah menyatakan sebagai kawasan bebas buta huruf dan berhasil mendemokratiskan lembaga-lembaga pendidikan. Pemerintahan Morales berhasil membebaskan 1,2 juta rakyat Bolivia dari buta-huruf.

Bentuk selanjutnya dari keberhasilan kepemimpinan Morales adalah kenaikan belanja infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik dan irigasi perairan. Ditandai dengan naiknya belanja infrastruktur tersebut dari USD 629 Juta pada tahun 2005 menjadi USD 6.5 Milyar pada tahun 2018 (Samuel, 2014).

Dari segala bentuk keberhasilan kepemimpinan Morales di Bolivia tidak serta mampu menopang rezimnya bertahan berkuasa di Bolivia.

B. Rumusan Masalah

Ditinjau dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu: “Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya rezim Evo Morales setelah 13 tahun memimpin Bolivia?”.

C. Kerangka Teori

Untuk dapat memudahkan penulis dalam menjelaskan analisis dari masalah dan untuk dapat menuliskan argumen yang tepat dan relevan, maka penulis akan menggunakan dua teori untuk kerangka pemikiran yaitu: teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim dan delegitimasi dan disintegrasi politik. Berikut penjelasannya:

1. Teori Bertahan dan Runtuhnya Suatu Rezim

Teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim merupakan teori yang dimiliki oleh Scott Mainwaring dan Anibal Perez-Linan (2013) dalam bukunya yang berjudul “*Democracies and Dictatorship in Latin America: Emergence, Survival, and Fall*”. Teori ini dibangun oleh Mainwaring dan Linan atas data-data empiris yang panjang terkait bertahan dan jatuhnya para pemimpin-pemimpin negara di Amerika Latin, khususnya pada abad 20 dan 21.

Dalam teori ini akan menempatkan aktor politik sebagai pusat analisa. Aktor politik tidak selalu merujuk langsung kepada pemimpin suatu negara tersebut. Aktor politik dalam teori ini akan terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Most Important Political Actors

Most Important Political Actor disini terdiri atas presiden atau organisasi yang sangat kuat

b. Major Actors

Major Actors disini terdiri dari pihak militer, pemberontak, organisasi, gerakan sosial, lembaga non-pemerintah, asosiasi bisnis, dan serikat-serikat lainnya.

Posisi aktor tersebut dapat tergantung pada pembahasan peneliti apakah akan merujuk pada aktor paling penting yaitu presiden ataukah kelompok penekannya yang berada dalam kategori major actors (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013).

Pada penelitian ini aktor akan dianalisa menggunakan tiga variabel yang sudah disediakan dalam teori ini, yaitu: preferensi, kebijakan dan politik internasional. Ketiga variabel tersebut terletak dalam kategori faktor politik. Penjelasan dari ketiga variabel tersebut adalah:

a. Segi Preferensi

Dari segi preferensi, dijelaskan bahwa aktor secara intrinsik tidak mempercayai demokrasi sebagai sistem yang paling baik dan mempunyai kecenderungan untuk menjadi pemerintah yang otoriter yang pada akhirnya mengakibatkan kubu oposisi semakin besar. Jika aktor paling penting dan kuat memiliki pendapat bahwa demokrasi

adalah bagian dari dominasi borjuasi, tidak efisien, sarang korupsi, hambatan dalam pertumbuhan ekonomi, maka suatu rezim rentan untuk runtuh.

b. Segi Kebijakan

Dari segi kebijakan, dijelaskan bahwa aktor politik yang mengambil kebijakan radikal yang ditandai dengan beralihnya kebijakan dari kutub satu ke kutub lainnya secara ekstrem akan menyebabkan rezim tersebut rawan goyah. Aktor yang memilih kebijakan moderat akan cenderung dapat mempertahankan rezimnya.

c. Segi Politik Internasional

Dari segi politik internasional, faktor internasional dapat mempengaruhi posisi aktor, baik secara langsung maupun tidak langsung, contohnya melalui perantara domestik.

2. Delegitimasi dan Disintegrasi Politik

Daniel Bar-Tal dalam bukunya yang berjudul “*Delegitimization: The Extreme Case of Stereotyping and Prejudice*” mendefinisikan delegitimasi mengacu pada stereotip negatif yang digunakan untuk menggambarkan kelompok tertentu. Kelompok-kelompok yang telah didelegitimasi dipandang melanggar norma-norma atau nilai-nilai dasar manusia dan oleh sebab itu mendapatkan pengecualian dari ciri sebagai orang-orang yang baik atau bahkan dapat diterima (Daniel Bar-Tal, 1989).

Fulvio Cammarano juga menjelaskan bahwa konsep delegitimasi tidak hanya menunjukkan keadaan atau kualitas hubungan suatu kekuasaan tetapi sebuah

proses yang bertujuan untuk menolak atau menarik pengakuan atas legitimasi politik lawan dengan menganggapnya sebagai kelompok yang tidak diakui secara konstitusi bersama (Cammarano, 2017).

Daniel Bar-Tal memaparkan bahwa ada lima jenis dari delegitimasi, yaitu *Dehumanization*, *Outcasting*, *Trait Characterization*, *Use of Political Labels* dan *Group Comparison*, berikut penjelasannya:

a. Dehumanization

Jenis delegitimasi yang mengkategorikan suatu kelompok sebagai non-manusia yang dilihat melalui rasnya yang terendah. Seperti contohnya delegitimasi yang terjadi adalah karakterisasi orang kulit hitam yang sering digunakan oleh orang kulit putih.

b. Outcasting

Jenis delegitimasi yang mengkategorikan suatu kelompok yang dianggap sebagai pelanggar norma-norma sosial. Seperti kategori berupa seorang pembunuh, psikopat, atau maniak. Pelanggar ini biasanya akan dikucilkan oleh masyarakat. Salah satu contoh jenis delegitimasi ini adalah kasus antara Israel dan Palestina, Israel telah melakukan banyak upaya dalam mendelegitimasi anggota dan simpatisan Organisasi Pembebasan Palestina dengan melabeli mereka sebagai pembunuh dan teroris, sementara Palestina mendelegitimasi Zionis sebagai rasis dan penjajah.

c. Trait Characterization

Jenis delegitimasi yang melibatkan ciri-ciri kepribadian yang dinilai sangat negatif dan tidak

dapat diterima oleh masyarakat tertentu. Penggunaan label seperti agresor, idiot, atau parasit merupakan contoh atas jenis delegitimasi ini. Seperti contohnya, Dr. Robert Ritter, yang merupakan kepala *Racial Hygiene and Population* yaitu unit peneliti biologi Kementerian Kesehatan pada Rezim Nazi Jerman. Ritter menggambarkan mayoritas masyarakat Gipsi pada tahun 1941 sebagai masyarakat yang tidak seimbang, tidak berkarakter, tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya.

d. Use of Political Labels

Jenis delegitimasi ini melibatkan kategorisasi suatu kelompok politik yang dianggap tidak dapat diterima oleh anggota masyarakat yang telah mendelegitimasi. Delegitimasi jenis ini diambil melalui tujuan, ideologi dan nilai politik suatu kelompok. Contoh dari jenis delegitimasi ini adalah Nazi, Fasis, Imperialis, Kolonialis, Kapitalis dan Komunis. Kelompok politik ini akan di delegitimasi suatu masyarakat jika mengancam nilai-nilai dasar suatu masyarakat dan dianggap akan membahayakan kesejahteraan masyarakat tersebut. seperti contohnya; Amerika melabeli Rusia sebagai Komunis dan Rusia melabeli Amerika sebagai Kapitalis.

e. Group Comparison

Jenis delegitimasi yang menggunakan label suatu kelompok yang melambangkan suatu kelompok sebagai contoh yang akan memberikan kejahatan ditengah-tengah masyarakat, penggunaan jenis ini dicontoh sebagai Vandal dan Pencuri. Jenis ini merupakan contoh bahwa setiap

suatu kelompok masyarakat memiliki contoh yang akan mendelegitimasi kelompok masyarakat lainnya sebagai simbol kedengkian dan kejahatan.

Ehud Sprinzak (1991) berpendapat bahwa munculnya delegitimasi politik disebabkan oleh perjuangan suatu kelompok untuk melakukan protes terhadap suatu rezim yang telah menyalahgunakan kekuasaannya. Delegitimasi politik akan terjadi jika krisis legitimasi akan terjadi setelah proses yang panjang.

Ehud Sprinzak membagi proses delegitimasi politik menjadi tiga jenis, yaitu; *transformational delegitimation*, *extensional delegitimation* dan *split delegitimation* (Sprinzak, 1991). Berikut penjelasannya:

a. Transformational Delegitimation

Sebuah proses radikalisme yang melibatkan kebangkitan gerakan sosial dan politik baru yang menentang rezim dan perubahan yang berawal dari oposisi yang damai menjadi terorisme.

b. Extensional Delegitimation

Sebuah proses radikalisme yang dimulai ketika gerakan oposisi yang ada diradikalisasi dengan cepat melawan otoritas yang berkuasa. Proses ini biasanya terjadi dalam konteks perjuangan nasionalis untuk mencapai kemerdekaannya dan para pejuang-pejuang separatisme.

c. Split Delegitimation

Sebuah proses delegitimasi yang di mana kolektivitas radikal terlibat dalam konflik dengan dua entitas yang berlawanan. Delegitimasi ini kemungkinan besar terjadi di dalam masyarakat

yang dilanda oleh perpecahan etnis, nasional atau agama (Sprinzak, 1991).

Sedangkan dalam kasus disintegrasi politik, penulis akan menggunakan tulisan Lewis W. Snider yang berjudul "*Political Disintegration in Developing Countries: Theoretical Orientation and Empirical Evidence*". Dalam tulisannya tersebut Snider menganalisa penyebab-penyebab disintegrasi politik yang terjadi khususnya di negara-negara dunia ketiga. Snider menganalisa dan membagi penyebab disintegrasi politik dapat terjadi dalam 3 bagian yaitu: *Ethnic Cleavages and Social Mobilization*, *Political Discrimination and Ethnic Dominance* dan *The Capabilities of the State Vis-à-vis Society* (Snider, 1984). Berikut penjelasannya:

a. Ethnic Cleavages and Social Mobilization

Bagian ini dijelaskan bahwa jika asimilasi budaya mendahului mobilisasi suatu kelompok masyarakat maka suatu pemerintahan cenderung akan tetap stabil dan pada akhirnya masyarakat akan terintegrasi menjadi satu dan jika di sisi lain di mana mobilisasi masyarakat mendahului asimilasi suatu budaya akan menyebabkan ketidakpuasan dari salah satu masyarakat yang dimobilisasi, mereka menganggap akan dijauhkan dari identitas politik dan budaya mereka. Hal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya kecepatan antara asimilasi dan mobilisasi sosial yang akan berpengaruh dalam memperkuat loyalitas tradisional dan identitas suatu masyarakat.

b. Political Discrimination and Ethnic Dominance

Lajunya mobilisasi sosial dan populasi yang sangat terdiferensiasi dengan sendirinya akan

menyebabkan suatu negara terancam jatuh kedalam fragmentasi politik. Hal tersebut dapat terjadi jika diawali dengan pemerintah pusat yang dikendalikan orang yang mengkonsolidasi otoritasnya dan kontrolnya atas penduduk di bawah yuridiksi teritorialnya. Anthony Birch (1978) menjelaskan bahwa konsolidasi yang dilakukan oleh masyarakat inti akan mengancam identitas politik dan budaya dari komunitas pinggiran. Komunitas inti akan memperoleh keuntungan politik atas komunitas pinggiran dalam periode pembangunan negara dan modernisasinya. Komunitas inti akan menggunakan kekuatan politik dan ekonominya untuk mempertahankan posisi superiornya. Hal tersebut menyebabkan disintegrasi politik yang tumbuh menjadi hasutan separatisme (Birch, 1978).

c. **The Capabilities of The State *vis-à-vis* Society**

Keamanan suatu rezim dari disintegrasi politik tidak akan dapat dipahami tanpa melihat pada kemampuan suatu rezim dalam hubungannya dengan masyarakatnya sendiri. Kekuasaan negara dapat diperlakukan sebagai kekuatan yang dihasilkan dari kekuatan bahwa suatu pemerintahan dapat mengekstraksi sumber daya dari masyarakatnya sendiri. Hal tersebut akan dibuktikan oleh kemampuan pemerintahan tersebut untuk mengekstraksi sumber daya dari masyarakat dan mengarahkan kembali sumber daya tersebut sesuai dengan kepentingan pemerintah itu sendiri. Stephen Krasner (1978) menjelaskan bahwa suatu rezim yang paling rentan akan terjadi disintegrasi politik adalah rezim yang memaksakan nilai-nilai baru dan pola-pola interaksi baru di dalam masyarakatnya. Sebuah rezim yang berupaya

seperti itu di dalam masyarakatnya yang secara etnis homogen dan tidak dibedakan secara kebudayaan (Krasner, 1978).

D. Hipotesis

Faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan rezim Evo Morales di Bolivia yang sudah bertahan selama 13 tahun lamanya, yakni:

- a. Faktor internal berupa preferensi dan kebijakan pada masa kepemimpinan Evo Morales yang menyebabkan meningkatnya disintegrasi dan delegitimasi politik dalam negeri terhadap kepemimpinan Evo Morales di Bolivia.
- b. Faktor eksternal berupa terdapatnya kepentingan dari OAS dan negara-negara kapitalis neoliberal yang berupaya dalam mendiskreditkan kepemimpinan ala sosialis Evo Morales di Bolivia.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan rezim Evo Morales di Bolivia pada tahun 2019 yang sudah berkuasa 13 tahun lamanya.

F. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini menjadi efektif dan relevan, maka penulis membuat batasan-batasan tertentu agar judul dan pembahasan sesuai dan tidak melebar. Jangkauan yang dimaksud di sini yaitu penulis berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan rezim Evo Morales di Bolivia dalam kurun waktu antara tahun 2014-2019 dimana dalam periode tersebut merupakan periode ketiga kepemimpinan Morales hingga pada pemilihan presiden Bolivia pada tahun 2019.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk dapat menentukan hasil dari sebuah penelitian yang dilakukan. Maka dari itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Diawali dengan deskripsi mengenai fakta-fakta yang terjadi seputar runtuhnya rezim Evo Morales di Bolivia, kemudian dirunut ke belakang untuk menemukan hubungan kausalnya dengan berbagai faktor penyebabnya. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah berupa *library research* yaitu memanfaatkan data berupa data sekunder yang dikumpulkan dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, laporan, media cetak, media elektronik, website serta karya ilmiah dan juga skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dengan teknik analisis konten terhadap sejumlah kata kunci yang berhubungan dengan faktor keruntuhan rezim Evo Morales tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini membahas lebih dalam mengenai perjalanan politik Evo Morales dan Partai *Movimiento al Socialismo* selama berkuasa di Bolivia sejak tahun 2006 hingga tahun 2019.

BAB III : Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai faktor internal yang mempengaruhi kejatuhan rezim Morales melalui segi preferensi dan

kebijakan menurut teori bertahan dan jatuhnya suatu rezim milik Mainwaring dan Linan.

BAB IV : Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai faktor eksternal yakni peran politik internasional dalam mempengaruhi kejatuhan rezim Morales di Bolivia.

BAB V : Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan rezim Morales di Bolivia pada tahun 2019.